PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Juni Tahun 2020

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab. Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

e-mail: pa.tasikmalaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya
Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat

e-mail: pa.tasikmalaya@gmail.com



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang - undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tasikmalaya, 13 Juli 2020 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

ZAINI RAHMAN NIP.197703012002121006

Daftar Isi

Kata P	Pengantar	i
Daftar	r lsi	ii
Perny	ataan Tanggung Jawab	iii
Ringka	asan	4
I. Lapo	oran Realisasi Anggaran	6
II. Ner	raca	7
III. Lap	ooran Operasional	9
IV. Lap	poran Perubahan Ekuitas	11
V. Cat	atan atas Laporan Keuangan	12
A.	Penjelasan Umum	12
В.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	21
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	21
VI. Lar	mpiran dan Daftar	

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya
Tasikmalaya - Jawa Barat
Telp. (0265) 544200 Fax. (0265) 546059

e-mail: pa.tasikmalaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 13 Juli 2020 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

ZAINI RAHMAN NIP.197703012002121006

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

(1.) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.192.750 atau mencapai 50% persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 3.302.598.894 atau mencapai 42.39 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.643.587.000.

(2.) NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Juni 2020.

Nilai Aset per 31 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.147.537.344 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 59.905.950 dengan Persediaan sebesar Rp. 29.905.950,- . Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 15.147.537.344 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 1.223.750.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 15.117.537.344.

(3.) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.192.750 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.751.820.348 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.

(3.747.471.380). Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus/defisit Pos-Pos Luar Biasa masingmasing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit -LO sebesar Rp (3.742.278.630).

(4.) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 14.856.007.596 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (3.742.278.630) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.662.572.838 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Juni 2020 adalah senilai Rp. 15.117.537.344.

(5.) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Juni 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0	
BELANJA	B.2	8.643.587.000	3.663.734.306	42.39	8.195.931.671	
Belanja Pegawai	В.3	7.026.843.000	2.940.347.039	41.84	6.937.377.090	
Belanja Barang	B.4	1.591.744.000	699.113.267	43.92	910.045.369	
Belanja Modal	B.5	25.000.000	24.274.000	97.10	128.865.000	
JUMLAH BELANJA		8.643.587.000	3.663.734.306	42.39	8.195.931.671	

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA NERACA

PER 31 Juni 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

(dalam satuan Rupiah)					
URAIAN	Catatan	31 Juni 2020	31 Deseember 2019		
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	0	0		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.	0	0		
Persediaan	C.3.	29.405.950	5.171.700		
Jumlah Aset Lancar		29.405.950	5.171.700		
ASET TETAP					
Tanah	C.4.	8.544.192.000	8.544.192.000		
Peralatan dan Mesin	C.5.	3.364.076.014	3.229.447.014		
Gedung dan Bangunan		6.358232.000	6.358232.000		
Aset Tetap Lainnya	C.6.	59.691.751	59.691.751		
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.7.	0	0		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8.	(3.239.784.121)	(2.995.570.481)		
Jumlah Aset Tetap		15.147.537.344	15.235.992.284		
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.9.	11.895.000	11.895.000		
Aset Lain-lain	C.10.	383.842.432	401.573.432		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya	C.11.	(394.513.682)	(411.632.807)		
Jumlah Aset Lainnya		1.223.750	1.835.625		
JUMLAH ASET		15.147.537.344	15.242.999.609		
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13.	0	45.756.473		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13.	0	3.187.500		

	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	45.756.473
	JUMLAH KEWAJIBAN		30.000.000	45.756.473
EKUITAS				
Ekuitas		C.14.	15.117.537.344	14.856.007.596
	Jumlah Ekuitas		15.117.537.344	14.856.007.596
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.147.537.344	15.242.999.609

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Juni 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Juni 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	4.348.968	1.161.468
JUMLAH PENDAPATAN		4.348.968	1.161.468
BEBAN			
Beban Pegawai	D. 2	3.933.429.259	3.570.689.985
Beban Persediaan	D. 3	0	15.728.400
Beban Barang dan Jasa	D. 4	528.745.307	287.826.110
Beban Pemeliharaan	D. 5	172.411.959	235.459.949
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	21.851.000	58.173.504
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	174.470.515	164.546.844
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
JUMLAH BEBAN		3.751.820.348	4.220.347.164
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.747.471.380)	(4.219.185.696)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.192.750	622.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.192.750	622.000

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	0	0	
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.742.278.630)	(4.218.563.696)

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Juni 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Juni 2020	31 Juni 2019
EKUITAS AWAL	E. 1	14.856.007.596	14.976.961.131
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.742.278.630)	(4.218.563.696)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		0	0
LAIN-LAIN			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3.662.572.838	4.097.610.161
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E. 7	79.705.792	120.953.535
EKUITAS AKHIR	E. 8	15.117.537.344	14.856.007.596

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2014 - 2020 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2014 sampai dengan 2020 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat"

Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah:

- 1. Menjaga Kemandirian sebagai Lembaga Peradilan;
- 2. Memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas dan tranparansi peradilan;
- 4. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar serta modern;
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan tupoksi;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
- 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
- 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
 Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

 Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net relizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan pitang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2019 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1. Tanah
 - 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Juni 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2019.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah: Rp. 0 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.192.750 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Juni TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0
2.	Penerimaan Perpajakan	0	0	0,00
3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 187.500,- atau 8,07 persen dibandingkan TA 2019.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Negara Bukan	0	0	187.500	8,07
	Pajak				
2.	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0
3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	187.500	8,07

Belanja **B.2.**

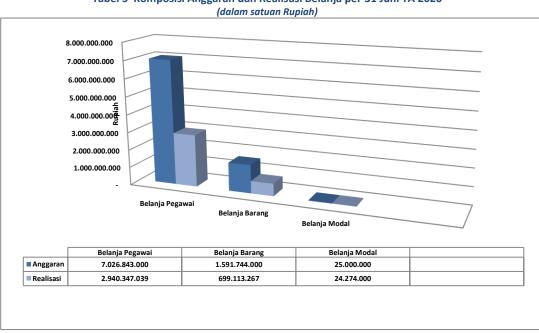
Realisasi Belanja Negara: Rp. 3.302.598.894

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 3.302.598.894 atau sebesar 42.39 % dari anggaran belanja sebesar Rp.8.643.587.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Juni TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Juni TA 2020 (dalam satuan Runiah)

Uraian	31 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.937.377.090	2.940.347.041	41.84
Belanja Barang	910.045.369	699.113.267	43.92
Belanja Modal	128.865.000	24.274.000	97.10
Total Belanja Bruto	8.195.931.671	3.302.598.894	42.39
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	8.195.931.671	3.302.598.894	42.39

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Juni TA 2020

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja Negara TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.891.880.777 atau sebesar 1,23 % dari realisasi akhir tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena Penurunan Realisasi Belanja Pegawai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	2.940.347.041	6.937.377.090	(3.947.030.049)	(4,01)
Belanja Barang	699.113.267	910.045.369	(806.081.728)	21,52
Belanja Modal	24.274.000	128.865.000	(104.591.000)	(11,15)
Total Belanja	3.302.598.894	8.195.931.671	(4.891.880.777)	(1,23)

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp. 2.940.347.041 Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.940.347.041 dan Rp. 6.937.377.090. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 3.947.030.049 atau sebesar 4,01 % dari realisasi tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Promosi dan Mutasi Pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.940.347.041	6.937.377.090	(3.947.030.049)	(4,01)
Belanja Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	2.940.347.041	6.937.377.090	(3.947.030.049)	(4,01)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	0
Total Belanja Netto	2.940.347.041	6.937.377.090	(3.947.030.049)	(4,01)

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 699.113.267

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.699.113.267 dan Rp. 910.045.369,-.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 806.081.728 atau 22,83 % dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pagu belanja barang pada TA 2020 yang disebabkan oleh masuknya anggaran Revisi BA.BUN untuk belanja Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim dan Tambahan Layanan Internet.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubah	an
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	337.977.853	461.390.026	123.412.173	26,75
Belanja Barang Persediaan	19.541.500	37.388.200	17.846.700	15,75
Belanja Jasa	147.830.955	141.877.194	5.953.761	56,54
Belanja Pemeliharaan	172.411.959	232.569.949	60.657.990	1,10
Belanja Perjalanan Dinas	21.851.000	58.173.504	36.322.504	0,93
Total Belanja Brutto	699.113.267	910.045.369	223.039.624	
				22,83
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	699.113.267	910.045.369	223.039.624	22,83

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 24.274.000 dan Rp. 128.865.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan pada TA 2020 pagu belanja modal lebih kecil daripada TA 2019.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan Bnagunan	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.274.000	128.865.000	(104.591.000)	(11,15)
Total Belanja Brutto	24.274.000	128.865.000	(104.591.000)	(11,15)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	24.274.000	128.865.000	(104.591.000)	(11,15)

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal :Rp. 0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0..

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan	0	0	0	0
Bnagunan				
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal : Rp.109.915.70 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 24.274.000 dan Rp. 128.865.000 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan pada TA 2020 pagu belanja modal lebih kecil daripada TA 2019.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Modal per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Komputer Unit	0	0	0	0
Laptop	24.274.000	74.910.000	50.636.000	32,81
Printer	0	0	0	0
Lan Internet	0	28.985.000	(28.985.000)	(100)
Scanner	0	0	0	0
Server	0	0	0	100
Rak Besi	0	24.970.000	(24.970.000)	(100)
Penambahan Nilai Gedung	0	0	0	0
dan Bangunan				
Total Belanja Brutto	24.274.000	128.865.000	104.591.000	(11,15)
Pengembalian Belanja	24.274.000	128.865.000	104.591.000	(11,15)
Total Belanja Netto	24.274.000	128.865.000	104.591.000	(11,15)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 45.756.473

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 12 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Belanja Dibayar Dimuka

Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp. 0. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat telah dibayarkannya secara penuh persekot gaji para pegawai. Tidak terdapat belanja dibayar dimuka untuk TA 2020 karena tidak ada Perskot Gaji. Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Persediaan

Persediaan: Rp. 29.405.950 Persediaan per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.59.905.950 dan Rp. 5.171.700. Persediaan merupakan jenis aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan pada tanggal neraca yang diperoleh yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	29.405.950	5.171.700
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0
Jumlah	29.405.950	5.171.700

C.4. Tanah

Tanah: Rp. 978.862.000 Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.544.192.000 dan Rp. 8.544.192.000. Rincian saldo tanah per tanggal 31 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	140	10.18.72.02.400016	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Rumah Dinas	113.888.000
2	1	5.433	10.18.24.09.4.00017	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Kantor PA. Tasikmalaya	8.430.304.000
Jun	nlah	5.573				8.544.192.000

Tidak Terjadi perubahan pada aset berupa tanah di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

C.5. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 3.287.595.526 Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.364.076.014 dan Rp. 3.287.595.526. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Juni 2019	3.287.595.526
Mutasi Tambah:	
Pembelian Peralatan dan Mesin	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian dari Penggunaan	(58.148.512)
Saldo per 31 Juni 2020	3.364.076.014
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Juni 2020	(3.239.784.121)
Nilai Buku per 31 Juni 2020	6.343.793.344

Terjadi penurunan pada Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 58.148.512 disebabkan oleh penghentian dari Penggunaan atau Penghapusan Aset Tetap yang berstatus rusak berat.

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 59.691.751

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 59.691.751,- dan Rp. 59.691.751,-.

Tidak ada penambahan nilai aset tetap lainnya pada periode 31 Juni 2020 yaitu masih dengan nilai Rp. 59.691.751 yang terdiri dari Monografi senilai Rp. 54.967.401,- dan aset tetap lainya senilai Rp. 4.724.350,- Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per September 2019	59.691.751
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 31 Juni 2020	59.691.751
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Juni 2020	0
Nilai Buku per 31 Juni 2020	59.691.751

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [3.239.784.12 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masingmasing Rp. (2.995.570.481)dan Rp. (2.771.728.212).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
1	Peralatan dan Mesin	3.364.076.014	2.591.320.021	638.126.993
2	Gedung dan Bangunan	6.358.232.000	364.250.460	5.993.981.540
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	59.691.751	0	0
	Jumlah	9.647.370.765	2.995.570.481	6.651.800.284

C.9. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain: Rp. 401.573.432

Saldo Aset Lain-lain per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 383.842.432 dan Rp.401.573.432. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

401.573.432
350.199.182
0
383.842.432
(394.513.682)
1.223.750

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya : Rp. [401.573.432] Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masingmasing Rp. (394.513.682) dan Rp. (411.632.807) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
1	Aset Tak Berwujud	11.895.000	(10.059.375)	1.223.750
2	Aset Lain Lain	383.842.432	(383.842.432)	0
	Jumlah	413.468.432	(394.513.682)	1.223.750

C.11. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 80.267.000 Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Juni 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp. 0 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Juni 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 45.756.473. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun

waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Juni 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang kepada Pihak Ketiga	0	45.756.473
Jumlah	0	45.756.473

C.13. Ekuitas

Ekuitas: Rp. 14.856.007.59 6 Ekuitas per 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 15.117.537.344 dan Rp. 14.856.007.596. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP: Rp.0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 5.192.750dan Rp. 0 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11.886.500	0	8,07
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Total Pendapatan	0	0	8,07

Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari Potongan Gaji Pimpinan Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2020 dikarenakan masih terdapat Rumah Dinas berstatus Aktif dalam BMN Pengadilan Agama Tasikmalaya.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 2.940.347.041 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.933.429.259 dan Rp. 3.570.689.985. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji	1.020.563.420	2.226.757.922	(393.074.055)	(17,65)
Beban Tunjangan- tunjangan	2.912.865.839	4.997.097.232	(1.295.691.207)	(25,92)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0	0
Jumlah	3.933.429.259	7.223.855.154	(1.684.765.262)	(23,32)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp.0 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 15.728.400 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	23.392.450	15.728.400	7.664.050	12,39
Konsumsi				
Beban Persediaan Bahan	0	0	0	0
untuk Pemeliharaan				
Beban Persediaan Suku	0	0	0	0
Cadang				
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	23.392.450	15.728.400	7.664.050	12,39

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp.572.814.660 Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 528.745.307 dan Rp. 614.157.877. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operaional	470.901.305	471.553.916	652.611	37,63
Beban Langganan Daya dan Jasa	57.193.002	141.890.961	84.697.959	12,01
Beban Jasa Pos dan Giro	651.000	713.000	62.000	42,98
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	528.745.307	614.157.877	85.412.570	31,72

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.169.120.474 Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 172.411.959 dan Rp. 235.459.949. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2019 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.391.000	92.746.839	6.644.161	7,91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.520.959	139.823.110	67.362.151	(3,41)
Beban Pemeliharaan lainnya	500.000	2.890.000	2.390.000	10,12
Total Beban Pemeliharaan	172.411.959	235.459.949	76.396.312	1,21

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp.45.518.504 Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.851.000 dan Rp. 58.173.504. Beban tersebut

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	18.401.000	51.598.504	33.197.504	(0,15)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.450.000	6.575.000	3.125.000	9,50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	21.851.000	58.173.504	36.322.504	0,93

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-; Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan	0	0	0	0
Bangungan untuk				
Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Beban Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
untuk Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				

Beban Barang Lainnya	0	0	0	0
untuk Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Total Beban Barang untuk	0	0	0	0
	U	U	U	· ·
Diserahkan kepada				
Masyarakat				

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0 Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-; Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.159.821.277 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 174.470.515 dan Rp. 164.546.844. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan	100.642.926	178.000.586	77.357.660	16,01
Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung	73.215.714	139.048.156	65.832.442	55,39
dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan,	0	0	0	0
Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak	611.875	1.223.750	611.875	0
Berwujud				
Beban Penyusutan Aset	0	0	0	0
lain-lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	174.470.515	164.546.844	143.801.977	33,15

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masingmasing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
tak Tertagih – Piutang				
Jangka Pendek				
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
tak Tertagih – Piutang				
Jangka Panjang				
Total Beban Penyisihan	0	0	0	0
Piutang tak Tertagih				

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0 Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus

(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Kantor				
Surplus dari Kegiatan Non	0	0	0	0
Operasional lainnya				
Total Surplus (defisit) dari	0	0	0	0
kegiatan Non Operasional				

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 14.856.007.596 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.856.007.596 dan Rp. 14.976.961.131

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (3.742.278.630)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. (3.742.278.630) dan Rp. (4.218.563.696). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Juni TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0
Perseulaan	

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp.0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-

dan Rp. 0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset Beban : Rp.0 Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masingmasing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban per 31 Juni TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi	
Beban Pegawai	0	1
Beban Jasa	0	1
Total Koreksi atas beban	0	

E.6. Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas Pendapatan : Rp.0 Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan per 31 Juni TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi		
Pendapatan Jasa Pelatihan	0		
Pendapatan Lainnya	0		
Total Koreksi atas	0		
Pendapatan			

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp. 14.856.007.596

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2020 dan TA 2019 adalah

masing-masing sebesar Rp. 15.117.537.344 dan Rp. 14.856.007.596.

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Tahunan TA 2020, DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu mengenai Maksimalisasi penyerapan anggaran.

Revisi Administrasi karena terjadi Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Semula

Nama : Drs. Sukar Sigit Handoyo Nip : 196402231994031002

Menjadi :

Nama : Zaini Rahman

NIP : 197703012002121006

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
		Manfaat		Penyusutan	
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	643.355.259	(539.926.687)	103.428.572
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	229.405.950	(229.405.950)	0
3.	Alat Kantor	238	414.953.539	(315.791.515)	99.162.024
4.	Alat Rumah Tangga	741	1.044.144.842	(968.092.882)	76.051.961
5.	Alat Studio	4	26.500.875	(9.463.675)	17.037.200
6.	Alat Komunikasi	18	17.965.750	(17.965.750)	0
7.	Peralatan Pemancar	2	270.234.200	(32.065.820)	238.168.380
8.	Komputer Unit	4	542.157.387	(434.910.662)	86.710.000
9.	Peralatan Komputer	4	188.172.349	(119.706.150)	59.210.000
10	. Peralatan Olahraga	1	240.000	(240.000)	0
В.	Gedung dan Bangunan				
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6	5.847.697.000	(67.056.040)	5.780.640.960
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	44.669.000	(1.718.038)	42.950.962
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D.	Aset Tetap Lainnya				
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0
2.	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	73	9.219.024.026	(3.239.784.121)	6.537.087.654

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA K

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUN

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}